BAB IV

Analisis putusan nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr.

Dan 2335/Pdt.G/2014/ PA.Kab.kdr. dalam penyelesaiannafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di pengadilan kabupaten kediri.

A. Analisis putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr.

1. Analisis Jenis Putusan Ex – officio

Dalam perjalanan rumah tangga tidak selamanya bahagia pasti ada pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar yang memicu terjadinya perceraian, Dalam hal perceraian seringkali para pihak tergugat hanya mengajukan gugatan murni tanpa mengajukan tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Namun dalam perkara No. 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr Majelis Hakim secara Ex – Officio (karena jabata hakim yang mempunyai hak untuk memerintah Penggugat), dapat memutuskan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diminta oleh para pihak.

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang diawali dengan replik dari penggugat maupun

duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

1. Analisis Isi Putusan

a. Menceraikan atau meminta persetujuan talak kepada istri

Seperti yang sudah dijelaskan didalam bab 2 tentang persetujuan atau permohonan izin talak yang dalam pasal 66 sampai pasal 77 UU no. 7 tahun 1989 yang telah di revisi undang – undang no 3 tahun 2006 yang isinya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di wilayah pengadilan agama dimana istri menetap dan bertempat tinggal. Didalam pasal 129 sampai pasal 131 sudah dijelaskan di bab 2 yang mana pada intinya seorang suami jika mentalak istrinya harus dikediaman istrinya, dan pengadilan agama memanggil Pemohon dan Termohon selambat – lambatnya 30 hari untuk ke Pengadilan Agama untuk menasehati kedua belah pihak jika tidak berhasil suami mengikrarkan talak ny didepan Pengadilan Agama dan jika suami tidak mengikrarkan talaknya paling lambat 6 bulan sejak terhitung sidang, jika setelah ikrar talak pengadilan agama mengeluarkan bukti perceraian.

b. Memberi nafkah iddah atas perintah hakim

Dalam putusan nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr isi putusan Ex – officio atau perintah hakim , majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membirkan nafkah iddah dan mut'ah di karenakan Penggugat telah mentalak cerai Tergugat, bahkan Penggugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dan juga penggugat akan meminang wanita lain.

Maka dari itu hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 serta nafkah anak yang masih berusia di bawah 17 tahun sebesar Rp. 500.000,00. Sesuai kemampuan suami yang bekerja sebagai wirasuwasta. Dan Penggugat menyanggupi perintah Majelis Hakim atas hukuman yang di bebaskan kepada Penggugat.

B. Analisis Putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr

1. Jenis Putusan Rekonvensi

Dengan berjalanya perceraian diruang sidang antara suami dan istri yang mana suami mentalak istri dengan adanya wanita lain didalam hubungan rumah tangga sehingga istri mengikhlaskan perceraian tersebut akan tetapi istri menggugat balik suami dengan gugatan rekonvensi yang mana di jelaskan dalam undang –undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 132 (a) dan pasal 132 (b).

Gugat balasan dikatakan bersama – sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum sampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah :

- a. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.
- b. Mempermudah prosedur.
- c. Menghindarkan putusan – putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Menetralisir tuntutan konvensi.
- e. Acara pembuktian dapat diserahkan.
- f. Menghemat biaya.

Gugatan rekonvensi hendaknya berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang. Sebagai contoh dalam praktek sidang Peradilan Agama, jika suami selaku pemohon, kemudian istri selaku termohon menuntut kepada pihak suami untuk menuntut hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Begitu juga bila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran ta'lik talak (sighot ta'lik talak) maupun syiqoq, maka pihak suami sebagai tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama.

Pada umumnya gugatan balik (rekonvensi) diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi (gugatan balik) pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Menurut ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg undang – undang nomer 3 tahun 2006 dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal yaitu:

- a. Penggugat dalam kualitas berbeda.

Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditunjukkan kepada diri sendiri pribadi Penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).

- b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.

- c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan.

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan.

2. Analisis isi putusan

- a. Perceraian talak

Dalam perceraian talak atas gugatan balik rekonvensi istri berhak menuntut balik suami untuk mendapatkan hak – hak istri dan suami wajib menyanggupi tuntutan istri, dalam undang – undang pasal 132 ayat (1) HIR, pasal 157 RBG gugatan rekonvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang di ajukan penggugat kepadanya yang berkaitan dengan perceraian yang rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah, hak asuh anak dan harta bersama.

Oleh sebab itu dalam perceraian talak pasal 66 UU no 7 tahun 1989 perceraian yang di ajukan oleh pemohon suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon yang berkembang setelah permohonan atau gugatan uang di ajukan oleh pemohon atau gugatan yang di ajukan oleh pemohon dan di jawab oleh termohon dengan mengajukan gugatan balasan atau gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah melalui putusan rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA. Kdr istri berhak mendapatkan hak- hak nya di karenakan suami yang mentalak istri di tambah lagi suami sudah menjalin cinta dengan wanita lain dan istri sudah ditinggalkan selama 1 tahun 1 bulan tanpa saling komunikasi.

Dan undang – undang nomer 7 tahun 1989 menyatakan untuk memberikan hak – hak mengajukan gugatan balik atau biasa di sebut rekonvensi yang mana istri dapat menuntut balik suami dan mendapatkan hak – haknya sebagai penguasa anak, nafkah anak, harta bersama dan yang paling terpenting mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah di karenakan istri yang tidak nuyzus.

Dan dengan tegas dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI (kompilasi hukum islam) menyatakan tentang kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri.

b. Gugatan balik istri tentang nafkah iddah dan mut'ah

Gugatan balik istri kepada suami atau biasa di sebut rekonvensi yang menuntut suami membayar nafkah iddah dan mut'ah yang di tentukan istri yang ada dalam putusan no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr yang jumlah nafkah iddah di minta sesuai dengan kemampuan suami.

Untuk nafkah mut'ah sendiri istri menuntut Rp.2500.000,00 dan nafkah iddah Rp. 2500.000,00 namun sang suami tidak sanggup untuk membayarnya, dikarenakan tidak sesuai dengan kemampuan suami. Sang suami bisa meminta permohonan untuk di berikan keringanan sesuai kemampuan suami dengan berdiskusi dengan istri di hadapan majelis hakim.

Jika sudah sama – sama setuju majelis hakim bisa memutuskan berapa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang akan dikeluarkan oleh suami kepada istri. Yang pada awalnya sang istri meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 2500.000,00 namun sang suami tidak sanggup karena pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya sehingga suami boleh meminta keringanan sesuai kemampuannya Rp500.000,00 namun Majelis hakim mengatakan tidak ada rasa keadilan dikarenakan suami telah menikah siri dengan wanita lain dan mengabaikan istri sudah cukup lama oleh karena itu majelis hakim memerintahkan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1500.000,00 karena sesuai dengan firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”¹

Dan sang istri setuju dengan putusan Majelis Hakim, maka majelis hakim bisa memutuskan berapa nafkah iddah dan

---

¹ Q.S Al – Baqarah 241

nafkah mut'ah yang dikeluarkan suami kepada istrinya yang masing – masing 1500.000,00.

C. Analisis tentang pertimbangan hakim mengenai putusan Ex- Officio nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr dan putusan Rekonfensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

1. Putusan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tentang nafkah iddah dan mut'ah

a. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim

1. Al – Qur'an

Kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada suami untuk istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan dikatakan dalam ayat

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya

---

² Q.S Al-Baqarah 241

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”³

2. KHI (kompilasi hukum islam)

Kewajiban suami kepada istri untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, di ukur dengan nafkah yang diberikan suami kepada istri pada saat masih rukun.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat wajb nya membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang di sesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami tersebut. Dan di sesuaikan dalam

Pasal 80 ayat 4

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung tanggung jawab untuk istri :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ayat 5 :

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan

Ayat 6 :

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

Ayat 7 :

---

³ QS. An-nisa 20

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

3. Undang – undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 huruf c

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dasar ayat Al – Qur’an surat Al – Baqaroh ayat 241 dan An – nisa’ ayat 20 yang dijadikan hukum oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, apabila terjadi perceraian Majelis hakim menggunakan Al – Qur’an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula yang telah dijelaskan dalam Al-quran surat Ath – Thalaaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِنَّمَا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dan al-quran tersebut bertujuan untuk memerintahkan Penggugat membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri yang diceraikan talak.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun hak Ex – officio Majelis Hakim di pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “meskipun pihak pencari keadilan (istri) tidak menuntut akan sesuatu (nafkah madli’yah, nafkah mut’ah dan nafkah anak) tetapi karena nafkah – nafkah tersebut sudah menjadi ketentuan undang – undang, maka tanpa dimintapun Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar kewajiban berupa nafkah – nafkah tersebut kepada istri.

Dan dari segi tujuan yang disyariatkan pemberian mut’ah (maqoshid asy – syar’i) dari pemohon (suami) kepada Termohon (istri) adalah untuk memberikan perasaan bahagia kepada sang istri karena rasa kecewa dan rasa kesedihan dari seorang istri yang akan ditalak. Apalagi yang menyebabkan perceraian itu karena kesalahan

pemohon itu sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Analisis mengenai putusan Rekonfensi dan pertimbangan hukumnya menurut :

a) Al – Qur’an

Memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah dari suami kepada istri hanya semata – mata untuk memberian perasaan gembira kepada istri karena kekecewaannya dan kesedihannya seorang istri yang akan ditalak, yang dimaksudkan dalam ayat sebagai berikut

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”⁴

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah nya untuk istri dan anak – anak nya yang di ukur dengan kemampuan suami serta kesanggupannya, maka dari itu Majelis Hakim meninjau dari ayat ini

---

⁴ QS. An- nisa 20

⁵ QS. Al-Baqarah 241

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فُلْيَفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶

b) KHI (kompilasi hukum islam)

Dalam perceraian suami – istri bahwa seorang anak yang di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz masih di bawah asuhan ibunya (hadhanah), dimana dijelaskan dalam pasal.

Kewajiban suami untuk melindungi istrinya baik yang masih berumah tangga maupun akan bercerai di jelaskan dalam pasal 34 ayat 1 dimana suami wajib melindungi dan membiyai keperluan istri kecuali istri nuyzus.

Pasal 34 ayat 1

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

---

⁶ QS. Ath – Thalaq 7

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberian biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali bila ia nuyzus.

Pasal 158

Mut'ah yang wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Majelis hakim akan mempertimbangkan kepada pihak penggugat dan tergugat dalam perkara rekonsvansi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara konvensi menetapkan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat di asuh oleh penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan
  - b. Nafkah mut'ah
  - c. Nafkah kepada anak

Yang dimaksud dari gugatan penggugat adalah sebagai akibat perceraian penggugat memohon kepada pengadilan Agama Kab. Kediri agar kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat. Tergugat di hukum untuk memberikan hak – hak penggugat berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah untuk anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat.

Gugatan balik (rekonsvansi) penggugat tersebut tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak dan penetapan hak asuh anak, tetapi tidak di susun dengan sistematika. Sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik (konvensi dan rekonsvansi), dengan demikian keadilan majelis hakim akan mempertimbangkanya karena penggugat bukan seorang ahli hukum atau bukan orang yang bekerja dibidang hukum.

Gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh penggugat masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama dan akan disampaikan dalam proses tahap jawab – menjawab (sebelum tahapan pembuktian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik (rekonsvansi) tersebut harus dapat dibenarkan dan dapat di periksa bersama – sama dengan perkara *a quo*, yang disesuaikan dengan

ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 239 K/Sip/1968.

Hak – hak penggugat sebagai orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pihak yang diceraiakan oleh tergugat berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak hak asuh anak adalah merupakan *ex officio* dari akibat perceraian agar penyelesaian sengketa penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara cepat dalam suatu proses.

Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan yang telah dijelaskan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi penggugat tersebut dapat diterima.

Gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang disempurnakan dengan keterangan tergugat dalam persidangan yang menyatakan tidak keberatan bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat.

Tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang diminta sedangkan pihak tergugat hanya menyanggupi sebagian yang diminta Penggugat dan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Perceraian menurut hukum islam dilakukan dengan cara (imsaqun bima'ruf tasriihun bihsan) yang artinya seorang suami menceraikan istrinya hendaknya memperhatikan hak – hak istri yang menjadi kewajiban suami.
- 2) Dalam persidangan terbukti bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah bahwa tergugat mempunyai wanita lain dan menikah siri

dengan wanita lain tersebut bukan karena Penggugat berbuat nusyus. Sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak – haknya.

- 3) Talak yang di jatuhkan tergugat maka penggugat mempunyai masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah Penggugat merawat anaknya. Tidak bekerja dan tidak boleh menikah dengan laki – laki lain.
- 4) Pasal 149 jo dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan utus karena talak, maka mantan suami wajib memeberikan mut'ah yang layak, nafkah, maskan dan kiswah (iddah) kepada mantan istrinya kecuali mantan istri telah dijatuhi talak nusyus dan dalam keadaan tidak hamil biaya hadhananh yang belum berumur 21 tahun.
- 5) Sesuai keterangan tergugat saksi – saksi tergugat yang tidak dibantah tergugat maka terbukti bahwa penghasilan tergugat lebih dari cukup, sehingga tergugat tidak tergolong orang yang dibebaskan dari kewajibannya.
- 6) Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat, menurut majelis hakim belum mencerminkan keadilan dan memenuhi standart .

Dasar ayat Al –qur'an surat Al – baqarah 241, An – nisa 20 dan Ath – Thalaah 7 dijadikan hukum oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian Majelis hakim menggunakan Al – Qur'an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula dijelaskan di surat Al – Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Dan Al – Qur'an memerintah suami Jika istri menuntut balik (rekonvensi) suami atas tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun pada pasal 86 ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan undang – undang nomer 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239.K/Sip/1968 dan nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 mengenai reonvensi yang di gunakan hakim di Pengadilan Agama yang isi nya“ gugatan soal pengasuhan anak nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.